

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENDAMPINGAN DESA DAN PEMANTAUAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA DESA-DESA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU)

Susanti¹⁾, Yesi Mutia Basri²⁾, Muhammad Rasuli³⁾
¹⁻³Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau
Email : Susanti7710@grad.unri.ac.id

Abstrak

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village government). Ketepatan waktu melaporkan merupakan indikator mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Siak merupakan kabupaten di Propinsi Riau yang menjadi contoh oleh BPKP Pusat dalam tata kelola keuangan desa. Pendekatan penelitian ini bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti membagikan angket kepada seluruh perangkat desa di Kabupaten Siak secara online menggunakan google form. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pendampingan desa dan pemantauan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi sebagai variabel moderasi. Pemanfaatan teknologi memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemanfaatan teknologi memoderasi pendampingan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemanfaatan teknologi memoderasi pemantauan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kompetensi, Pendampingan, Pemantauan, Teknologi

Abstract

The village government must be able to apply the principle of accountability in the management of village finances, where all final village government activities must be accountable to the village community according to the provisions so that good village governance is realized. Timeliness of reporting is an indicator of realizing good financial management accountability. Siak is a district in Riau Province that has become an example by the Central BPKP in village financial management. This research approach is quantitative. In this study, researchers distributed questionnaires to all village officials in Siak Regency online using a google form. The purpose of this study was to examine and analyze the effect of human resource competence, village assistance and monitoring on the accountability of village financial management with the use of technology as a moderating variable. The use of technology moderates the competence of human resources towards village financial management accountability, the use of technology moderates village assistance to the accountability of village financial management, the use of technology moderates the monitoring of village financial management accountability.

Keywords: Accountability, Competence, Mentoring, Monitoring, Technology

1. PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia akuntabilitas dana desa masih menjadi salah satu isu yang menarik perhatian banyak kalangan. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti pedoman penyusunan dan rawan manipulasi. APB Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Pasal 37 Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 2014 menyatakan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya, namun pada kenyataannya kepala desa menyerahkan laporan pelaksanaan tugas yang telah dijalkannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau seringkali terlambat.

Mahmudi (2010) akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi amanah. Akuntabilitas publik meliputi kewajiban organisasi publik untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang apa yang telah, sedang, dan direncanakan dalam pelaksanaan kinerjanya. Maka, akuntabilitas pemerintah diharapkan tidak hanya memfokuskan pada pemanfaatan sumber daya yang ada, akan tetapi juga pada kinerjanya.

BPKP dalam situsnya <https://www.bpkp.go.id>, titik kritis yang menjadi perhatian dalam pertanggungjawaban keuangan desa adalah Keterlambatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, perangkat desa yang kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keuangan desa antara lain: 1) Penggunaan kas desa secara tidak syah (Theft of Cash on Hand); 2) Mark up dan Kick Back pada pengadaan barang dan jasa.

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di propinsi Riau yang telah membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Desa) pada tahun 2020 sebesar 275.933.950.837,78. Penganggaran dana yang besar seyogyanya dikelola dengan

bersungguh sungguh namun, berdasarkan informasi dan data real dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di pemerintahan desa di Kabupaten Siak kurang baik karena punya dua masalah besar. Masalah besar pertama, keterlambatan penyampaian laporan. Masalah besar kedua dan lebih memprihatinkan yaitu ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat. Hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan auditor inspektorat Siak terbukti FS diduga melakukan tindak pidana korupsi dana APBKAM tahun 2020 sebesar Rp231,7 juta. Kampung TM memiliki anggaran APBKAM sebesar 2 milyar lebih. “Dalam anggaran tersebut ada kegiatan pengadaan barang, kegiatan rutin dan kegiatan fisik yang seluruhnya dana tersebut sebagian disimpan sendiri oleh kepala desa atau penghulu kampung. Ada tiga kegiatan dalam pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasinya dan menggunakan surat pertanggungjawaban yang fiktif atau dengan cara memalsukan cap dan tanda tangan penyedia (<https://www.aورانews.id/nusantara>). Dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dengan demikian penulis menduga bahwa permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kab. Siak dipengaruhi oleh beberapa factor. *Pertama*, variabel Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan suatu kewajiban untuk memberikan laporan kepada pihak lain tentang apa yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga menyangkut pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berkepentingan, dengan tingkat transparansi yang tinggi maka dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Kabupaten Siak. *Kedua*, kompetensi sumber daya manusia, kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan dan

kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. *Ketiga* pendampingan desa. Pendampingan seperti dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 128, pada peraturan tersebut dijelaskan secara teknis pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dan dapat dibantu juga oleh tenaga pendamping yang profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/ atau oleh pihak ketiga. *Keempat* pemantauan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Salah satu dalam aktivitas pengelolaan anggaran yang perlu dilakukan demi mencapai kinerja anggaran yang baik yaitu dengan melakukan pengawasan secara memadai (Budi dan Cahaya, 2018).

2. TELAHAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Telaah Literatur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Stewardship Theory

Stewardship theory merupakan bagian dari teori agency, menurut (Donaldson & Davis 1989) teori stewardship menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Teori stewardship didasari atas teori psikologis serta sosiologi para pemikir akuntansi manajemen. Teori stewardship memberikan sebuah asumsi filosofi dari sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan teori stewardship menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas steward dan principal. Tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik menjadikan principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi fungsi pengelolaan. Sehingga diperlukan adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan, keterbatasan yang dimiliki

principal mengakibatkan adanya pemberian amanah terkait pengelolaan sumber daya tersebut kepada *steward*.

Teori Institusional (*Institusional Theory*)

Teori Institusional (*Institusional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung (Ridha dan Basuki, 2012).

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Adisasmita (2011:30), pengertian akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan dan kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas demi keberhasilan organisasinya.

Pendampingan Desa

Pendampingan Desa ialah suatu kegiatan memberdayakan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian dan fasilitasi desa di mana salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pendampingan desa.

Pemantauan

Definisi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan desa berjalan untuk secara efisien dan efektif sesuai dengan rancangan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 3 Ayat (1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 bahwa pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten / kota.

Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al. , 2000).

Stewardship theory

Stewardship theory merupakan bagian dari teori agency, menurut (Donaldson & Davis 1989) teori stewardship menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu. Teori stewardship didasari atas teori psikologis serta sosiologi para pemikir akuntansi manajemen. Teori stewardship memberikan sebuah asumsi filosofi dari sifat manusia yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, jujur serta memiliki integritas atas setiap aktivitas yang dilakukannya. Berdasarkan teori stewardship menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas steward dan principal. Tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik menjadikan principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi fungsi pengelolaan. Sehingga diperlukan adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan, keterbatasan yang dimiliki principal mengakibatkan adanya pemberian amanah terkait pengelolaan sumber daya tersebut kepada Steward. Teori stewardship menjelaskan bentuk pola kepemimpinan dan hubungan atasan dengan bawahannya dalam sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Kepala desa dan perangkat desa (*stewards*) cenderung termotivasi untuk berlaku

sesuai keinginan dari pemerintah (*principals*). Menurut Teori stewardship kepentingan bersama adalah dasar seorang Stewards melakukan tindakan. Sehingga apabila terdapat perbedaan kepentingan antara principals dan stewards, maka steward akan berusaha bekerjasama untuk bertindak sesuai dengan tindakan principals dan demi kepentingan bersama agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam Stewardship theory adalah stewards menyelaraskan tujuan sesuai tujuan principals namun bukan berarti steward tidak memiliki kebutuhan.

Penerapan teori stewardship digunakan karena kepercayaan dari *principals* yang diberikan kepada pemerintah desa (*stewards*) dapat terjadi jika bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya. Penggunaan teori Stewardship pada organisasi pemerintahan desa adalah untuk mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggung jawabkan apa yang diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal.

Teori Institusional (*Institutional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institutionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (legitimate) serta layak untuk didukung (Ridha dan Basuki 2012).

Teori Institusional

Teori Institusional yang dikemukakan oleh (Scott, 2008) menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu individu atau penguasa

yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan, dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kualitas sumber daya yang melaksanakan fungsi akuntansi sangatlah penting. Kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan dari sumber daya manusia tersebut. Dalam hal ini peneliti dapat mengatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengemban tanggungjawab terhadap tugas yang dilimpahkan menurut fungsi yang telah ditentukan. Sumber daya manusia juga harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian sebelumnya menurut Khoirul (Aswar, et.al, 2019) kompetensi aparatur besar berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. (Dewi, 2019), Kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Pendampingan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam implementasi uu desa, pendamping desa sangat dibutuhkan untuk mendampingi dan membina perangkat desa dalam segala pekerjaan teknis yang ada di desa. Kompetensi seorang pendamping desa sangat mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pasal 128 Ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pendampingan masyarakat desa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Sementara itu, ayat 3 pasal yang sama menyebutkan bahwa camat atau sebutan

lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya. Ini artinya, pendampingan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan bahkan swasta.

(Wiguna, 2018) mengatakan bahwa peran pendamping desa memberikan efek yang positif terhadap pengelola keuangan desa dan (Parwati, 2018) mengatakan bahwa pendamping desa secara parsial berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pendampingan desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Pemantauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau diadakan untuk penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan. Sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi dan menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut, sehingga pengembangan pekerjaan dapat ditinkatkan pelaksanaannya.

Menurut penelitian yang dilakukan (Mahmud, 2018) pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin meningkat pengawasan maka akan meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana. Dalam penelitian sebelumnya menurut (Umaira, Adnan 2019) pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik (Gamaliel, 2017) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pemantauan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pemanfaatan Teknologi Memoderasi Hubungan antara Kompetensi SDM dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam penyusunan laporan keuangan, apabila sumber daya manusia yang berkompeten

didukung dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tepat maka akan menciptakan kecepatan dan ketepatan dalam pemrosesan transaksi yang akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya teknologi informasi juga memberikan manfaat dalam meminimalisir terjadinya kesalahan, biaya pemrosesan yang lebih rendah, efektivitas dan efisiensi waktu dan dapat menyimpan data dalam kapasitas besar.

Penelitian yang dilakukan (Na'fiah, 2018) tentang Implementasi dan Evaluasi Siskeudes. Hasilnya menunjukkan bahwa kendala utama implementasi Siskeudes yang dirasakan oleh desa berkaitan dengan SDM desa evaluasi dari implementasi Siskeudes adalah diperlukan sinergi dari SDM, baik SDM di desa maupun SDM di BPKP sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas yang diharapkan. (Sari, 2009) menyatakan efektivitas pemanfaatan SIA pada suatu organisasi tercermin dari kemampuan SDM dalam menggunakan komputer, semakin baik, kompeten serta mahirnya seorang karyawan menggunakan komputer.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Pemanfaatan teknologi memoderasi hubungan antara kompetensi SDM dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Pemanfaatan Teknologi Memoderasi Hubungan antara Pendampingan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Permendes No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa menjelaskan secara luas bahwa setiap desa perlu pendampingan dalam melakukan pengelolaan dana desa. Aplikasi yang dibangun oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dalam pengelolaan dana desa adalah Siskeudes yang telah dikembangkan sejak tahun 2015. Pada tahun 2019 para pengelola keuangan desa dituntut untuk mampu menggunakan aplikasi siskeudes versi terbaru yaitu Siskeudes 2.0. Dengan adanya pemanfaatan teknologi akan memudahkan proses pembinaan, pengajaran, dan pengarahan dalam menjalankan program aplikasi SISKEUDES.

Penelitian (Pratiwi, 2020) hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan minat menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*) secara bersama-sama mempengaruhi penggunaan Siskeudes. Penelitian yang dilakukan (Na'fiah, 2018) tentang implementasi dan evaluasi Siskeudes. Hasilnya menunjukkan bahwa kendala utama implementasi Siskeudes yang dirasakan oleh desa berkaitan dengan SDM desa evaluasi dari implementasi Siskeudes adalah diperlukan sinergi dari SDM, baik SDM di desa maupun SDM di BPKP sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas yang diharapkan. Sehingga, diperlukan pendampingan dari BPKP secara berkelanjutan kepada SDM desa supaya memiliki kompetensi yang cukup dalam mengimplementasikan Siskeudes.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: Pemanfaatan teknologi memoderasi hubungan antara pendampingan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Pemanfaatan Teknologi Memoderasi Hubungan antara Pemantauan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

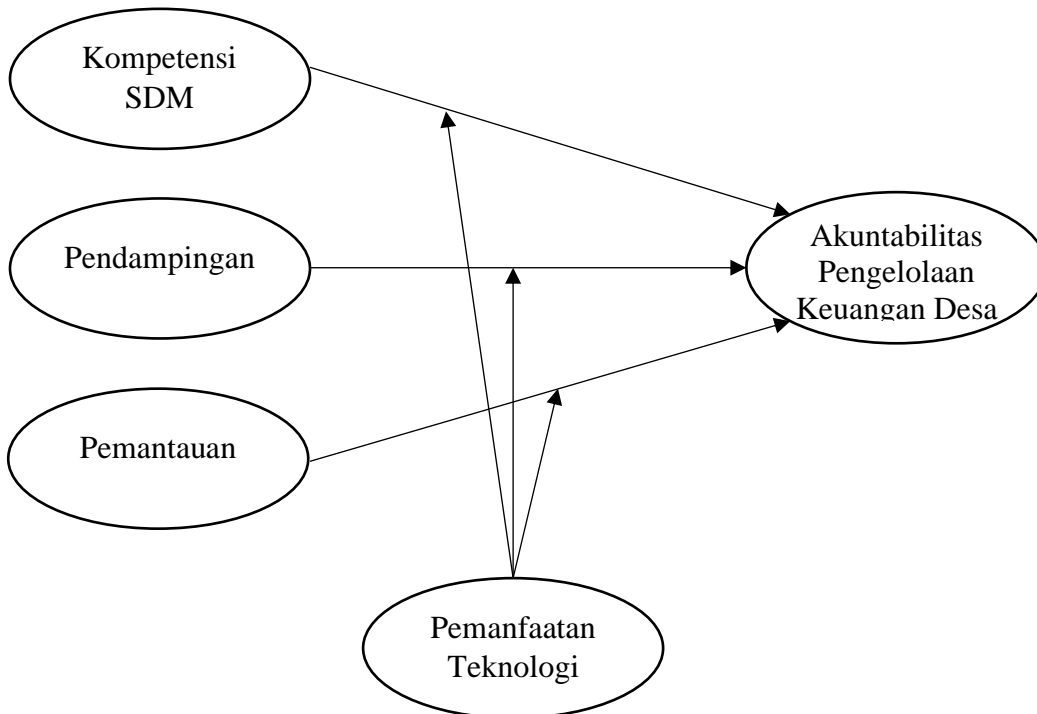
Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan kebutuhan yang sangat penting. Melalui kemajuan teknologi, aplikasi yang ada selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan zaman.

(Hasanah, 2013), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh positif dan signifikan baik secara langsung, dan tidak langsung terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian yang dilakukan (Oktavia, 2015) hasilnya menunjukkan penggunaan piranti komputer (teknologi informasi) dalam audit memudahkan auditor dalam membuat kertas kerja audit, memperoleh informasi berkaitan dengan auditan, mendeteksi kecurangan (*fraud*), melakukan monitoring secara berkala, membuat laporan audit, memudahkan penyimpan file-file audit, dan mempermudah auditor dalam melakukan analisis data.

Berdasarkan uraian di atas, sistem informasi dengan menggunakan teknologi informasi saat ini menjadi salah satu faktor penting dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6: Pemanfaatan teknologi memoderasi hubungan antara pemantauan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Gambar 1 adalah model penelitian yang memberikan deskripsi tentang penampilan topik dalam penelitian. Penelitian dilakukan di desa desa di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.



Gambar 1 Model Penelitian
(Mattew Miles dan A.Michael Huberman, 2007: 20)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kuantitatif. Tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak Propinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah adalah 122

desa di Kabupaten Siak Propinsi Riau. Responden yaitu kepala desa, kaur keuangan, setdes. Sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Instrumen Penelitian
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan

No	Variabel	Definisi Operasional	Instrumen Penelitian
		mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatannya terkait dengan pengelolaan dana desa.	Mahmudi (2011) dalam Mada et al (2017) 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam Pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Ketepatan penyampaian laporan
2.	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Kharis, 2010)	Edison et al (2016) dalam Mada et al (2017) 1. Pengetahuan 2. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan 3. Keahlian teknis 4. Kemampuan mencari solusi 5. Inisiatif dalam bekerja
3	Pendampingan Desa	Pendampingan Desa ialah suatu kegiatan memberdayakan masyarakat melalui asistensi, pengarahan, pengorganisasian dan fasilitasi desa di mana salah satu tujuannya ialah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan tujuan diterbitkannya kebijakan pendampingan desa	Izzan Aufa Mahsa Arifin (2021) 1. Kualitas 2. Kuantitas 3. Ketetapan Waktu 4. Efektifitas 5. Kemandirian 6. Komitmen kerja

4.	Pengawasan	Tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan pemerintah desa untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. (Sapartiningsih, dkk 2018)	Sapartiningsih, dkk (2018) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan penggunaan APBDes 2. Pengawasan masyarakat 3. Pengawasan secara internal dan eksternal. 4. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa 5. Pengawasan secara preventif dan repressif.
5.	Pemanfaatan Teknologi	Penggunaan secara optimal dari komputer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi	Wilkinson et al (2000) diadaptasi oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan perangkat komputer yang memadai 2. Ketersediaan perangkat lunak (software) untuk mengelola dana desa 3. Ketersediaan jaringan Internet

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti membagikan angket kepada aparatur

pemerintahan desa Kabupaten Siak melalui Kepala DPMK, group WhatsApp Aparatur Pemerintahan Desa, bertemu langsung Aparatur Desa pada saat kegiatan Bujang Kampung, kuesioner diisi secara online menggunakan google form. Teknik Analisis Data yaitu analisis deskriptif, analisis non response bias, analisis inferensial.

Tabel 2 Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Nama Kecamatan	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Kuesioner Diolah
Siak	18	18	18
Sungai Apit	42	42	42
Kerinci Kanan	36	35	35
Minas	12	12	12
Koto Gasib	33	32	32
Mempura	21	21	21
Kandis	24	21	21
Tualang	24	24	24
Sungai Mandau	27	27	27
Sabak Aau	24	21	21
Lubuk Dalam	21	21	21
Dayun	33	31	31
Bungaraya	30	29	29
Pusako	21	20	20
		354	354

Sumber: Data Primer Tahun 2021 Diolah

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa jumlah responden terbanyak ada pada Kecamatan Sungai Apit sebanyak 42 orang (11,48 %) dan jumlah responden terkecil ada di Kecamatan Minas yaitu 12 orang (4,92 %).

- Berikut dapat dilihat pada Tabel 3 Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner:

Tabel 3 Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	366
Kuesioner baik (pertanyaan kuesioner terisi)	354
Kuesioner rusak (pertanyaan kuesioner tidak terisi)	12
Kuesioner yang digunakan untuk keperluan input data	354
Responden rate = $354/366 \times 100\%$	98%

Sumber: Data Primer Tahun 2021 Diolah

Kemudian akan dijelaskan mengenai gambaran umum karakteristik dari responden yang berisi tentang umur, jenis kelamin dan jenjang pendidikan. Karakteristik responden ini akan

dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 4 mengenai data responden sebagai berikut:

Tabel 4 Profil Responden

Keterangan	Total	Presentase (%)
Jumlah Sampel yang dikirim	366	100%
Jumlah Sampel yang diolah	354	98%
Jenis Kelamin		
Pria	271	76,55
Wanita	83	23,45
>20-30	64	18,08%
>30-40	146	41,24%
>40-50	103	29,10%
>50	141	11,58%
Lama Jabatan		
0 - < 2	104	29,38
2 - < 4	132	37,29
4 - < 6	76	21,47
> 6	42	11,86
Pendidikan		
SLTA	201	56,78
D1	4	1,13
D II	3	0,85
D III	14	3,95
D IV / S1	126	35,59
S2	6	1,69

Sumber: Data Primer Tahun 2021 Diolah

Berdasarkan Tabel 4 diketahui jumlah responden pria lebih banyak dibanding responden wanita. Jumlah responden pria sebanyak 271 orang (76,5 %) dan jumlah responden wanita sebanyak 83 orang (23,45%). Dengan banyaknya jumlah pegawai laki-laki diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya. menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah berusia antara 30-40 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Responden dengan rentang lama jabatan kurang dari 2 tahun sebanyak 104 orang (37,29%), rentang lama jabatan di atas 2 tahun kurang dari 4 tahun sebanyak 132 orang (21,47%), rentang lama jabatan di atas 4 tahun kurang dari 6 tahun sebanyak 76 orang

(21,47%), rentang lama jabatan di atas 6 tahun sebanyak 42 orang (11,86%).

Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan SLTA sederajat yaitu sebanyak 201 orang (56,78%), sedangkan untuk responden yang berpendidikan D1 sebanyak 4 orang (1,13%), berpendidikan D II sebanyak 3 orang (0,85%), berpendidikan D III sebanyak 14 orang (3,95%), responden yang berpendidikan D IV / S1 sejumlah 126 orang (35,59%), responden yang memiliki jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang (1,69%)

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja usia produktif dibatasi sampai usia 65 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa di Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagian besar berada pada rentang usia produktif.

Tabel 6 Deskriptif Statistik Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
APKD	354	13	25	21,051	2,444
KSDM	354	14	35	27,308	4,292
PD	354	12	30	23,5	4,100
PM	354	10	20	15,873	2,033
PT	354	11	20	15,774	2,076

Sumber: Data Primer Tahun 2021 Diolah

Dari Tabel 6 diatas bahwa Variabel APKD dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan melalui skala *likert* 5 skor dengan nilai terendah 1 (satu) dan Nilai tertinggi 5 (lima). Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum memiliki kisaran teoritis antara sebesar 13 nilai maksimum 25 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,051 dengan standar deviasi sebesar 2,444. Nilai rata-rata dan standar deviasi APKD menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya,

Variabel KSDM dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 7 item pernyataan melalui skala *likert* 5 skor dengan nilai terendah 1 (satu) dan Nilai tertinggi 5 (lima). Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum memiliki kisaran teoritis antara

sebesar 14 nilai maksimum 35 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,308 dengan standar deviasi sebesar 4,292. Nilai rata-rata dan standar deviasi KSDM menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Variabel PD dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 6 item pernyataan melalui skala *likert* 5 skor dengan nilai terendah 1 (satu) dan Nilai tertinggi 5 (lima). Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum memiliki kisaran teoritis antara sebesar 12 nilai maksimum 30 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,5 dengan standar deviasi sebesar 4,100. Nilai rata-rata dan standar deviasi PD menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya

Variabel PM dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan melalui skala *likert* 5 skor dengan nilai terendah 1 (satu) dan Nilai tertinggi 5 (lima). Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum memiliki kisaran teoritis antara sebesar 10 nilai maksimum 30 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15,873 dengan standar deviasi sebesar 2,033. Nilai rata-rata dan standar deviasi PM menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Variabel PT dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 item pernyataan melalui skala *likert* 5 skor dengan nilai terendah 1 (satu) dan Nilai tertinggi 5 (lima). Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum memiliki kisaran teoritis antara sebesar 11 nilai maksimum 20 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15,774 dengan standar deviasi sebesar 2,076. Nilai rata-rata dan standar deviasi PT menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Tabel 7 Uji Non Response Bias

Variabel	Cut Off	N	Mean	Std. Dev.	Sig.
KSDM	Tepat Waktu	113	27,354	4,204	0,516
	Tidak Tepat Waktu	241	27,286	4,341	
PD	Tepat Waktu	113	23,478	4,064	0,877
	Tidak Tepat Waktu	241	23,506	4,125	
PM	Tepat Waktu	113	15,912	1,934	0,371
	Tidak Tepat Waktu	241	15,855	2,081	
PT	Tepat Waktu	113	15,787	2,081	0,847
	Tidak Tepat Waktu	241	15,767	2,078	
APKD	Tepat Waktu	113	21,071	2,081	0,750
	Tidak Tepat Waktu	241	21,041	2,078	

Sumber: Data Primer Tahun 2021 Diolah

Dari hasil pengujian Tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel penelitian mendapatkan nilai signifikansi (*sig.*) *Levene's Test for Equality of variance* yang lebih besar dari tingkat kesalahan yang ditolerir sebesar 5%

(0,516; 0,877; 0,371; 0,847 dan 0,750 > 0,05). Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jawaban responden atas pertanyaan masing-masing variabel sebelum dan sesudah *cut off*.

Tabel 8 Validitas Diskriminan

Indiaktor	KSDM	PD	PM	PT	APKD
KSDM1	(0.810)	0.013	-0.015	0.044	0.097
KSDM2	(0.825)	-0.055	0.008	-0.033	-0.066
KSDM3	(0.827)	0.053	-0.002	0.039	0.028
KSDM4	(0.817)	-0.034	-0.008	0.012	0.004
KSDM5	(0.846)	0.069	0.002	-0.059	-0.074

Indiaktor	KSDM	PD	PM	PT	APKD
KSDM6	(0.819)	-0.049	-0.003	-0.011	0.034
KSDM7	(0.814)	0.000	0.019	0.011	-0.019
PD1	-0.075	(0.858)	0.065	-0.021	-0.059
PD2	-0.014	(0.828)	0.096	-0.046	-0.116
PD3	0.069	(0.878)	-0.081	0.007	0.059
PD4	0.034	(0.884)	-0.106	0.020	0.110
PD5	0.016	(0.819)	0.014	-0.011	-0.032
PD6	-0.033	(0.850)	0.021	0.049	0.028
PM1	0.093	-0.012	(0.780)	-0.038	-0.086
PM2	-0.082	-0.016	(0.805)	0.050	0.096
PM3	-0.036	0.009	(0.793)	0.004	0.007
PM4	0.029	0.020	(0.781)	-0.017	-0.021
PT1	0.001	0.006	-0.022	(0.772)	0.063
PT2	-0.073	-0.015	0.083	(0.781)	0.010
PT3	0.100	-0.005	-0.067	(0.784)	-0.108
PT4	-0.030	0.015	0.006	(0.756)	0.037
APKD1	-0.004	0.047	0.025	-0.061	(0.752)
APKD2	-0.044	0.033	0.051	0.057	(0.794)
APKD3	0.090	-0.018	-0.057	-0.064	(0.734)
APKD4	-0.042	-0.042	0.035	0.023	(0.815)
APKD5	0.008	-0.017	-0.058	0.037	(0.788)

Sumber: Data Primer Tahun 2021 Diolah

Dari Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa nilai *loading factor* untuk setiap indicator dari masing-masing variable laten telah memiliki nilai *loading factor* yang paling besar dibanding

nilai *loading* variable laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variable laten telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Tabel 9 Uji Validitas *Square Root Of Average(AVE)*

Variabel	APKD	KSDM	PD	PM	PT
KSDM	0.565	(0.823)	0.514	0.624	0.140
PD	0.517	0.514	(0.853)	0.467	-0.027
PM	0.610	0.624	0.467	(0.790)	-0.069
PT	-0.331	0.140	-0.027	-0.069	(0.773)
APKD	(0.777)	0.565	0.517	0.610	-0.331

Validitas diskriminan dikatakan baik apabila *square root* atas AVE sepanjang garis diagonal lebih besar korelasinya antara satu konstruk dengan yang lainnya. Dari Tabel 9 diatas dapat diketahui bahwa nilai *square root*

atas AVE sepanjang garis diagonal lebih besar korelasinya antara satu konstruk dengan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki tingkat validitas yang baik.

Tabel 10 Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keputusan
KSDM	0.920	0.936	Reliabel
PD	0.925	0.941	Reliabel
PM	0.799	0.869	Reliabel
PT	0.776	0.856	Reliabel
APKD	0.836	0.884	Reliabel

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai *cronbach's alpha* > 0,6 dan *composite reliability* > 0,7 yang

menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria (*reliable*).

Tabel 11 Hasil Pengujian Determinasi

Model Struktural	R Square	R Square Adjusted
APKD	0.533	0.525

Sumber: Data Primer Tahun 2021 Diolah

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Adjusted R Square APKD sebesar 0,533. Artinya adalah sebesar 53,3% variabel Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendampingan dan Pemantauan dengan Pemanfaatan Teknologi sebagai variabel moderasi.

Tabel 12 Model Fit dan Quality Indexes

Model Fit and Quality Indices	Indeks	P-value	Kriteria	Keterangan
Average path coefficient (APC)	0.185	P < 0,001	P ≤ 0,05	Diterima
Average R-squared (ARS)	0.533	P < 0,001	P ≤ 0,05	Diterima
Average adjusted R-squared (AARS)	0.525	P < 0,000	P ≤ 0,05	Diterima
Average block VIF (AVIF)	1.578	Acceptable if ≤ 5, Ideally ≤ 3.3		Diterima
Average full collinearity VIF (AFVIF)	1.822	Acceptable if ≤ 5, Ideally ≤ 3.3		Diterima
Tenenhaus GoF (GoF)	0.645	Small ≥ 0,1; Medium ≥ 0,25; Large ≥ 0,36		Large
Sympson's paradox ratio (SPR)	1,000	≥ 0,7		Diterima
R-squared contribution ratio (RSCR)	1,000	≥ 0,9		Diterima
Statistical suppression ratio (SSR)	1,000	≥ 0,7		Diterima
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	1,000	≥ 0,7		Diterima

Sumber: Data Primer Tahun 2021 Diolah

Dari Tabel 12 dapat dijelaskan bahwa nilai *average path coefficient* (APC) sebesar 0,185 dengan *p-value* < 0,001; *average R-squared* (ARS) sebesar 0,533 dengan *p-value* < 0,001 dan *average adjusted R-squared* (AARS) sebesar 0,525 dengan *p-value* < 0,001 yang dapat diartikan bahwa model peneliti mempunyai *fit* yang baik.

Kemudian diperoleh nilai *average variance inflation factor* (AVIF) sebesar 1,578 dan *average full collinearity variance inflation factor* (AFVIF) sebesar 1,822 < 3,3 yang berarti bahwa tidak ada masalah multikolonieritas antar indikator dan antar variabel eksogen. Selanjutnya nilai *tenenhaus goodness of fit* sebesar 0,645 > 0,36 yang menunjukkan bahwa kekuatan prediksi model adalah besar atau *fit* model sangat baik.

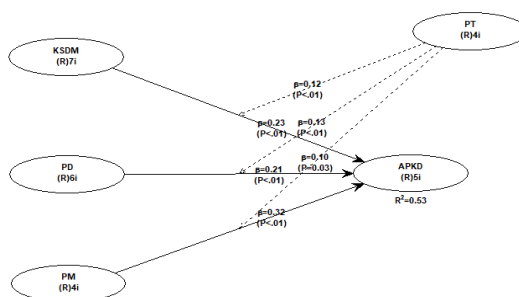
Untuk mengevaluasi *quality indexes*, diperoleh nilai indeks *symson's paradox ratio* (SPR) sebesar 1,000 > 0,70 (ideal), *R-squared contribution ratio* (RSCR) sebesar 1.000 > 0,90 (ideal), *statistical suppression ratio* (SSR) sebesar 1,000 > 0,70 (ideal) dan *nonlinear bivariate causality direction ratio* (NLBCDR) sebesar 1,000 > 0,70 berarti bahwa indeks-indeks tersebut tidak ada problem kausalitas didalam model.

Tabel 13 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Path Coefficient	P Values	Keputusan
KSDM → APKD	0.226	<0,001	Signifikan
PD → APKD	0.213	<0,001	Signifikan
PM → APKD	0.323	<0,001	Signifikan
PT*KSDM → APKD	0.124	0.009	Signifikan
PT*PD → APKD	0.129	0.007	Signifikan
PT*PM → APKD	0.095	0.035	Signifikan

Sumber: Data Primer Tahun 2021 Diolah

Dari hasil pengujian diatas, dapat dilihat gambar model diagram penelitian sebagai berikut:



Gambar 4.4 Model Diagram Penelitian

Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,213 dengan p value < 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p value < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut, dengan adanya aparat pengelola keuangan desa yang memiliki tingkat kompetensi yang baik dapat meminimalisir terjadinya kendala-kendala selama proses pengelolaan dana desa. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa yang baik dapat menghasilkan output yang baik pula sehingga dapat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini memiliki arah yang positif. Berdasarkan hal ini, Menurut McClelland mendefinisikan kompetensi (*competency*) sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat mendeskripsikan, kinerja yang sangat baik.

Pengaruh Pendamping Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,210 dengan p value < 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p value < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti variabel pendampingan berpengaruh signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut, dengan berperannya pendampingan dalam proses pengelolaan dana desa maka kualitas pengelolaan dana desa akan menjadi semakin baik, Peran pendamping memberikan saran-saran terkait administrasi yang sesuai regulasi. Pendamping desa akan memantau dan membantu apabila aparat desa kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi siskeudes.

Hasil penelitian ini memiliki arah yang positif. Adanya peran pendamping desa dapat membantu mengatasi kendala dan mendukung kelancaran pengelolaan dana desa dengan baik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Pemantauan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,328 dengan p value < 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p value < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p value < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, Variabel pemantauan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut, dengan optimalnya fungsi pemantauan dalam proses pengelolaan keuangan desa maka kualitas pengelolaan dana desa akan menjadi semakin baik, kegiatan monitoring juga membantu

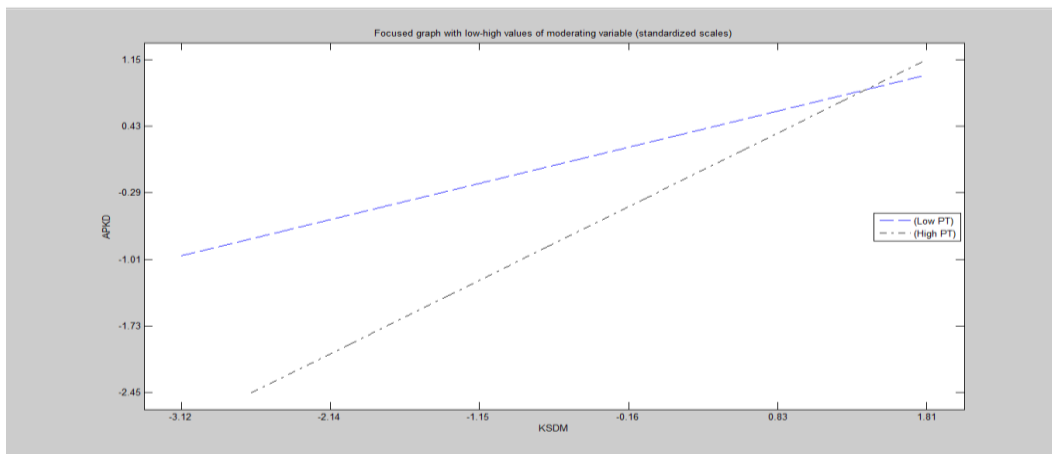
pengambil kebijakan di desa untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan telah berhasil dan tuntas atau belum.

Hasil penelitian ini memiliki arah yang positif. Berdasarkan hal ini, pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Halim, dkk,2012).

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Hubungan Kompetensi SDM Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,131 dengan p value 0,005. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p value 0,005 < 0,05. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa sumber daya manusia berpengaruh

signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi sebagai variabel moderasi. Kemudian diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,131 yang berarti bahwa setiap peningkatan interaksi pemanfaatan teknologi dengan sumber daya manusia sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,131 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan.



Gambar 2 Grafik Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

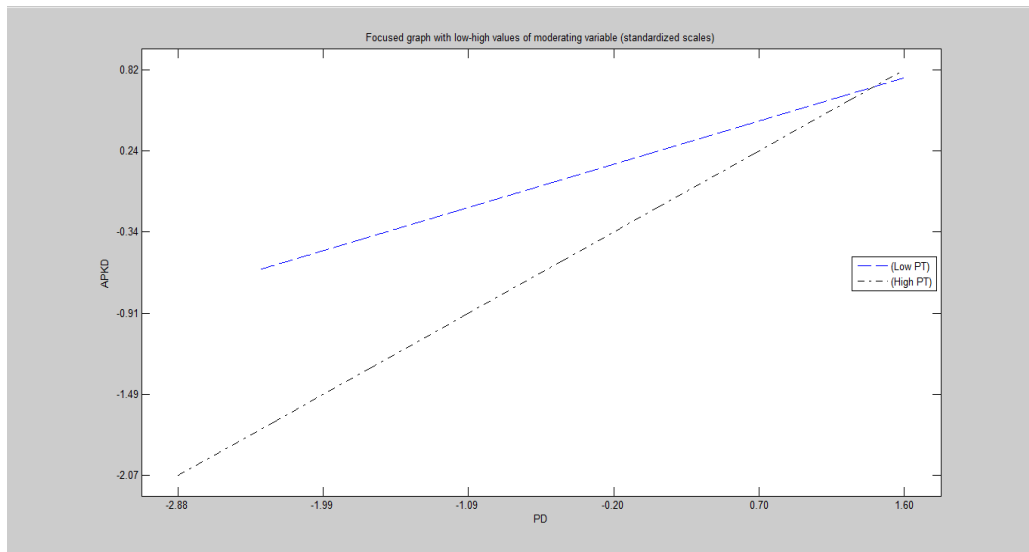
Gambar 2 menunjukkan slop interaksi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi, semakin kuat pengaruh

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Hubungan Pendamping Desa Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,132 dengan p value 0,005. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p value 0,005 < 0,05. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa pendampingan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan

kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

pemanfaatan teknologi sebagai variabel moderasi. Kemudian diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,132 yang berarti bahwa setiap peningkatan interaksi pemanfaatan teknologi dengan pendampingan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,132 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan



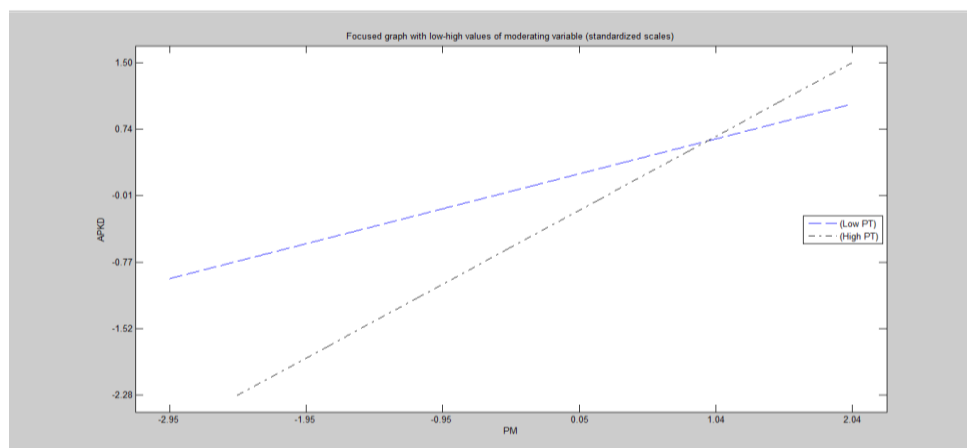
Gambar 3 Grafik Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Pendampingan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 3 merupakan slop interaksi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi, semakin kuat pengaruh pendampingan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Hubungan Pemantauan Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,102 dengan p value 0,024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p value 0,024 < 0,05.

Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa pemantauan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan pemanfaatan teknologi sebagai variabel moderasi. Kemudian diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,102 yang berarti bahwa setiap peningkatan interaksi pemanfaatan teknologi dengan pemantauan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,102 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan.

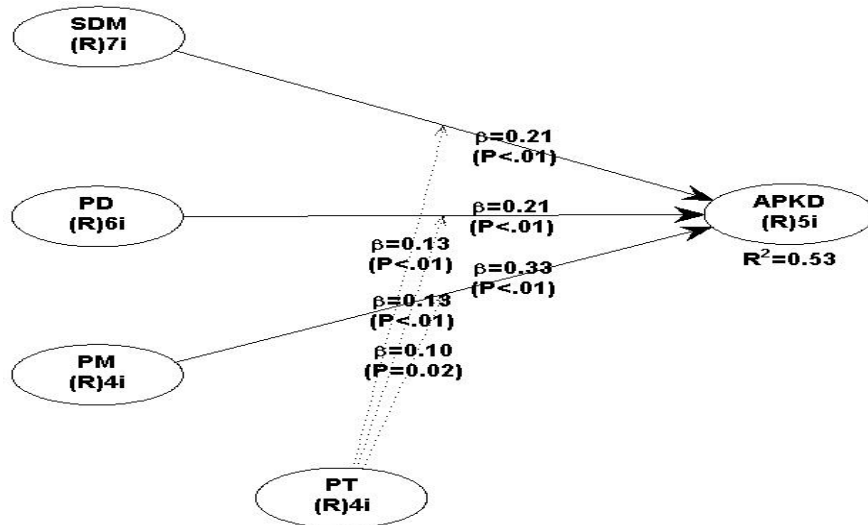


Gambar 4 Grafik Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Pemantauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Gambar 4 merupakan slop interaksi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi, semakin kuat pengaruh pemantauan

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dari hasil pengujian diatas, dapat dilihat gambar model diagram penelitian sebagai berikut:



Sumber: Data WarpPLS 7.0 Diolah

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntailitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian variabel kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Siak. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis pertama yang menduga adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yaitu (Dewi, 2019), kompetensi perangkat desa memiliki

pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pendampingan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian variabel pendampingan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Siak. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis kedua yang menduga adanya pengaruh pendampingan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yaitu (Wiguna, 2018) mengatakan bahwa peran pendamping desa berpengaruh positif terhadap pengelola

keuangan desa. Penelitian ini juga didukung oleh (Parwati, 2017) dimana pendamping desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pemantauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian variabel pemantauan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan memiliki kontribusi yang positif dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Siak. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis ketiga yang menduga adanya pengaruh pemantauan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima.

Hasil Penelitian (Wibowo, 2017) menunjukkan hasil bahwa kurangnya peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadikan pengawasan kurang optimal. Sedangkan hasil penelitian (Sapartiningsih, dkk 2018) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan menjadi sebuah kontrol atas kinerja pemerintahan desa, maka dalam melaksanakan kegiatan pemerintah desa harus lebih teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan

Pemanfaatan Teknologi Memoderasi Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Siak menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh pemanfaatan teknologi. Dapat diartikan bahwa pemanfaatan teknologi pada pemerintah desa Kabupaten Siak mampu memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis keempat yang menduga bahwa pemanfaatan teknologi memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.

Hasil penelitian ini mendukung Teori institusional bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan social.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh (Widyatama, et.al 2017), (Martini, et.al 2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dapat memoderasi hubungan antara kompetensi SDM dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimilikinya.

Pemanfaatan Teknologi Memoderasi Hubungan antara Pendampingan Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh pendampingan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Siak menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh pemanfaatan teknologi. Dapat diartikan bahwa pemanfaatan teknologi pada pemerintah desa Kabupaten Siak mampu memperkuat hubungan pendampingan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis kelima yang menduga bahwa pemanfaatan teknologi memoderasi pengaruh pendampingan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.

Hasil dari penelitian ini selaras dengan yang dilakukan (Pratiwi, 2020) dan (Na'fiah, 2018) Pemanfaatan teknologi memoderasi hubungan antara pendampingan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Pemanfaatan Teknologi Memoderasi Hubungan antara Pemantauan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh pemantauan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Siak menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh pemanfaatan teknologi. Dapat diartikan bahwa pemanfaatan teknologi pada pemerintah desa Kabupaten Siak mampu memperkuat hubungan pemantauan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis keenam yang menduga bahwa pemanfaatan teknologi memoderasi pengaruh pemantauan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.

Temuan penelitian ini mempertegas hasil penelitian (Pratiwi, 2020), (Na'fiah, 2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi dapat memoderasi hubungan antara pemantauan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5. SIMPULAN

Dalam hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; pendampingan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; pemantauan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; pemanfaatan teknologi berperan dalam meningkatkan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; pemanfaatan teknologi berperan dalam meningkatkan pendampingan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; pemanfaatan teknologi berperan dalam meningkatkan pemantauan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Saran

1. Peneliti tidak melakukan wawancara langsung kepada responden untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden, sehingga responden dapat bertanya secara langsung kepada peneliti atas pertanyaan-pertanyaan yang belum difahami dari kuesioner yang diberikan.
2. Penelitian ini hanya mengambil populasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak saja, oleh karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada ruang lingkup yang lebih luas karena apabila diperbanyak populasi dan sampelnya kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda.

3. Waktu penelitian yang sangat singkat, apabila penelitian dapat dilakukan dalam waktu lebih lama ikut secara langsung dalam setiap tahapan proses yang ada pada desa, maka hasil penelitian akan lebih maksimal.
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variable lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy & Jogiyanto. 2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Ed.1. Yogyakarta: ANDI.
- Abdurahman, dkk. 2011. *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam., & Hengky Latan. 2012. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam., & Hengky Latan. 2014. *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS3.0 edisi kedua*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam & Latan, Hengky (2017). *Partial Least Square: Konsep, Metode, dan Aplikasi menggunakan program WarpPLS 5.0, Edisi ke-3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Solihin, Mahfud., Dwi Ratmono. 2013. "Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0". Yogyakarta. Penerbit Andi
- Akuntansi, J., Sriwijaya, P. N., & Desa, P. M. (2015). *Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan rambutan banyuasin*. 21.
- Dewi, L. P. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan

- Peran Pen- damping Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 12(1), 820–829.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Haza, I. I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawas Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–19.
- Husein, Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latjani, T. S. D., & Santosa, A. B. (2019). *Original Paper Participatory Management of School Operational Assistance Funds Program in the State Junior High School , South Tinombo*. 6(4), 471–482.
- Nafi'ah, N. K. (2013). Implementasi dan evaluasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nugroho, I. (2009). Peranan Teknologi Informasi Dalam Audit Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi. *Jurnal Dinamika Informatika*, 1(2), 122–130.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pengawasan, D. A. N., Akuntabilitas, T., Desa, D., Kasus, S., Kabupaten, P., & Barat, A. (2019). *Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya)* 1,2. 4(3).
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Influence of Information Technology Utilization , Budgeting Participation and Supervi. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(2), 160–168.
- Setyoko, P. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14–24. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIAN/A/article/view/589>
- Susanti, V., Rizal, S., Indrayenti, I., Khairudin, K., & Haninun, H. (2020). Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 70. <https://doi.org/10.36448/jak.v11i2.1525>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Akuntansi, J., Sriwijaya, P. N., & Desa, P. M. (2015). *Dampak kompetensi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan rambutan banyuasin*. 21.
- Haza, I. I. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawas Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–19.
- Latjani, T. S. D., & Santosa, A. B. (2019). *Original Paper Participatory Management of School Operational Assistance Funds Program in the State Junior High School , South Tinombo*. 6(4), 471–482.
- Nafi'ah, N. K. (2013). Implementasi dan evaluasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Provinsi Jawa Timur. *Journal of*

- Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nugroho, I. (2009). Peranan Teknologi Informasi Dalam Audit Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi. *Jurnal Dinamika Informatika*, 1(2), 122–130.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pengawasan, D. A. N., Akuntabilitas, T., Desa, D., Kasus, S., Kabupaten, P., & Barat, A. (2019). *Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya)* 1,2. 4(3).
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka Influence of Information Technology Utilization , Budgeting Participation and Supervi. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(2), 160–168.
- Setyoko, P. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14–24. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIAN/A/article/view/589>
- Susanti, V., Rizal, S., Indrayenti, I., Khairudin, K., & Haninun, H. (2020). Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 70. <https://doi.org/10.36448/jak.v11i2.1525>
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>